

Press Release

Diskusi Publik : Ketimpangan di Era Otonomi

Tujuan akhir dari pembangunan di Indonesia adalah perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang tercantum dalam sila ke-5 Pancasila. Otonomi daerah adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Namun, jauh panggang dari api, tujuan yang diharapkan dengan penerapan otonomi daerah terkait dengan perbaikan keadilan, tampaknya belum terjadi hingga saat ini. Malah sebaliknya, pasca otonomi daerah, ketimpangan (indeks gini) di Indonesia terus meningkat dengan capaian tertinggi pada 2011 dengan nilai indeks gini sebesar 0,41.

Melihat kondisi di atas, INDEF melakukan kajian untuk mencari faktor yang menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan (indeks gini) pasca otonomi daerah. Kajian dilakukan dengan menganalisis data yang mencakup 33 provinsi pada periode tahun 2006-2016.

Dari hasil pengolahan data diperoleh sejumlah hasil antara lain adalah:

1. **Dana transfer memiliki korelasi positif dengan ketimpangan.** Artinya, semakin tinggi dana transfer, angka indeks gini meningkat (ketimpangan melebar). Apabila dibedah lebih detail berdasarkan kategori dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) maka kedua dana ini memiliki arah hubungan yang berbeda dengan ketimpangan. Dana lokasi umum berkorelasi positif dengan ketimpangan, sebaliknya dana alokasi khusus memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan.
2. ***Degree of revenue* berkorelasi positif dengan ketimpangan.** *Degree of revenue* tinggi berarti sebuah daerah dengan penerimaan porsi PAD yang relatif besar. Daerah-daerah dengan tingkat PAD tinggi memiliki ciri sebagai daerah perekonomiannya ditopang oleh industri ekstraktif, industri manufaktur dan wilayah perkotaan yang berciri padat modal. Pada akhirnya, pembagian kue ekonomi di daerah dengan ciri khas tersebut terkonsentrasi pada pemilik modal.

3. ***Degree of expenditure*** memiliki korelasi negatif dengan ketimpangan. Semakin tinggi *degree of expenditure* menggambarkan peran dan kemampuan pemerintah kabupaten dan kota terhadap penyediaan layanan publik semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah nilai rasio maka semakin rendah pula peran pemerintah kab/kota terhadap penyediaan layanan publik.
4. **Belanja pelayanan dasar pendidikan berkorelasi positif dengan ketimpangan.** Hal ini diduga, belanja pendidikan belum optimal untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun lebih untuk belanja rutin gaji guru dan pembangunan infrastruktur sekolah.
5. Berbeda dengan belanja kesehatan yang berkorelasi negatif dengan ketimpangan. **Bisa disimpulkan bahwa belanja kesehatan lebih berkualitas dibandingkan dengan belanja pendidikan** dalam hal menyediakan pelayanan dasar sebagai modal terwujudnya kesempatan yang sama dalam mengakses kegiatan produktif.
6. **Pertumbuhan ekonomi tidak inklusif.** Hal ini ditandai dengan korelasi positif antara pertumbuhan dengan ketimpangan. Bisa diartikan, pertumbuhan ekonomi diiringi dengan ketimpangan yang meningkat.
7. Tingkat upah minimum menjadi berkorelasi positif dengan ketimpangan. **Ketentuan upah minimum hanya bisa diakses oleh pekerja formal dan itupun hanya beberapa sektor saja seperti industri manufaktur dan jasa.** Pekerja non formal di sektor lain tidak mendapatkan akses UMP, upah yang ada berada di bawah UMP.

Melihat temuan di atas, INDEF mendorong pengkajian ulang atas sejumlah kebijakan agar ketimpangan dapat diturunkan. Beberapa pengkajian tersebut antara lain adalah :

1. **Peninjuan terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.** Tinjauan ini mencakup kerangka besar kebijakan serta instrumen yang digunakan untuk eksekusi desentralisasi. Instrumen tersebut adalah dana transfer dan dana alokasi umum. Formulasi DAU dan ketentuan-ketentuan di dalamnya harus dioptimalkan untuk

tujuan utama peningkatan akses pelayanan dasar serta kerja-kerja yang mendukungnya.

2. **Mempertahankan dan meningkatkan kualitas kebijakan dana alokasi khusus** yang ditujukan untuk mendukung program-program prioritas nasional. Ke depan, peningkatan pelayanan dasar (Pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi produktif lain) harus lebih dioptimalkan, bukan hanya melalui jalur DAK tapi juga DAU.
3. **Meningkatkan kualitas belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki *output indikator pendidikan*** semisal angka partisipasi murni (APM). Selain itu, pelaksanaan wajib belajar minimal 12 tahun perlu diupayakan dalam rangka menyediakan akses kesempatan Pendidikan bagi semua orang. Mengurangi porsi belanja rutin pegawai dalam belanja 20% Pendidikan bisa menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan belanja pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas output Pendidikan.
4. **Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif** sebagai salah satu upaya untuk pemerataan kue ekonomi pembangunan.
5. **Mewujudkan UMP yang bisa diakses oleh pekerja formal di seluruh sektor** dan peningkatan produktivitas pekerja informal agar memiliki tingkat upah setara UMP.

7 November 2018

Institute for Development of Economics and Finance